



RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2026

**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
PROVINSI KALIMANTAN BARAT**



GUBERNUR KALIMANTAN BARAT

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN BARAT

NOMOR 30 TAHUN 2025

TENTANG

**PENETAPAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2026**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 142 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penetapan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2026;
- Mengingat** : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2022 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 41);

5. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6780);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
10. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 8) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2024 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 3);
11. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2025 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 6);
12. Peraturan Gubernur Nomor 25 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026 (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2025 Nomor 25);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENETAPAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2026.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Provinsi Kalimantan Barat.
3. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Barat.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang terdiri dari Sekretaris Daerah, Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah.
5. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat.
6. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut Sekretariat DPRD adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Barat.
7. Inspektorat Daerah adalah Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Barat.
8. Dinas Daerah adalah Dinas Daerah Provinsi Kalimantan Barat.
9. Badan Daerah adalah Badan Daerah Provinsi Kalimantan Barat.
10. Pembangunan Daerah adalah usaha yang sistematis untuk pemanfaatan sumber daya yang dimiliki daerah untuk peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah sesuai dengan urusan pemerintah daerah yang menjadi kewenangan.
11. Perencanaan Pembangunan Daerah adalah suatu proses untuk menentukan kebijakan masa depan, melalui urutan pilihan, yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam jangka waktu tertentu di daerah.
12. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan Kepala Daerah.
13. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan pemerintah daerah periode 1 (satu) tahun.
14. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
15. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

16. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi 1 (satu) atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh anggaran sebagian atau seluruhnya dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
17. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh 1 (satu) atau beberapa Perangkat Daerah sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program, terdiri dari sekumpulan tindakan pengeralahan sumber daya personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau satu jenis sumber daya tersebut.
18. Sub Kegiatan adalah bagian dari kegiatan yang dilaksanakan oleh 1(satu) Perangkat Daerah sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu kegiatan, terdiri dari sekumpulan tindakan pengeralahan sumber daya personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau satu jenis sumber daya tersebut.
19. Keluaran (*output*) adalah barang atau jasa yang dihasilkan oleh kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran strategis dari tujuan program dan kebijakan.
20. Hasil (*outcome*) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam satu program mengacu pada sasaran strategis dan tujuan yang telah ditetapkan.

BAB II RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

Pasal 2

- (1) Renja Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat kebijakan, program, evaluasi pelaksanaan kegiatan, perkiraan capaian tahun berjalan, Renstra Perangkat Daerah serta tujuan dan sasaran program/kegiatan Perangkat Daerah.
- (2) Sistematika Renja Perangkat Daerah Tahun 2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. BAB I. PENDAHULUAN;
 - b. BAB II. HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU;
 - c. BAB III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH;
 - d. BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH; dan
 - e. BAB V. PENUTUP.

(3) Dokumen Renja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Tahun 2026 terdiri dari:

- a. Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat;
- b. Inspektorat Provinsi Kalimantan Barat;
- c. Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Barat;
- d. Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Kalimantan Barat;
- e. Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Barat;
- f. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Kalimantan Barat;
- g. Badan Penghubung Provinsi Kalimantan Barat;
- h. Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Barat;
- i. Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Barat;
- j. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Barat;
- k. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Barat;
- l. Badan Pengelolaan Perbatasan Daerah Provinsi Kalimantan Barat;
- m. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Barat;
- n. Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Barat;
- o. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kalimantan Barat;
- p. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Barat;
- q. Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Barat;
- r. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat;
- s. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Barat;
- t. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Barat;
- u. Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Barat;
- v. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Kalimantan Barat;
- w. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Barat;
- x. Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Provinsi Kalimantan Barat;
- y. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Kalimantan Barat;
- z. Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Barat;
- aa. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kalimantan Barat;
- bb. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Barat;
- cc. Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Barat;
- dd. Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Barat;
- ee. Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Kalimantan Barat;
- ff. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Barat;
- gg. Satuan Polisi Pamong Praja; dan
- hh. Rumah Sakit Jiwa Provinsi Kalimantan Barat

(4) Renja Perangkat Daerah Tahun 2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 3

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat.

Ditetapkan di Pontianak
pada tanggal 30 Juli 2025
GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,



[Signature]

RIA NORSAN

Diundangkan di Pontianak
pada tanggal 30 Juli 2025
SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN BARAT,



HARRISON

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT TAHUN 2025 NOMOR 30



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Jalan Jenderal Ahmad Yani Pontianak, Kalimantan Barat 78124

Telepon (0561) 741163 Faksimile (0561) 764919

Laman www.satpolpp.kalbarprov.go.id _ Pos-el satpolpp@kalbarprov.go.id

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : SUHERMAN, S.H., M.H.

NIP : 19701110 200212 1 005

Jabatan : Kepala Satuan

Instansi : Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat

Dengan ini menyatakan bahwa, Renja Perangkat Daerah Tahun 2026 ini telah disesuaikan dengan hasil penyelarasan dan verifikasi dengan RKPD Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2026 bersama Tim Verifikator dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Barat.

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
Provinsi Kalimantan Barat


SUHERMAN, S.H., M.H.
Pembina Utama Muda / IVc
NIP. 19701110 200212 1 005

PERSETUJUAN
KETUA TIM VERIFIKATOR RENJA
PERANGKAT DAERAH

(.....)



GUBERNUR KALIMANTAN BARAT

KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN BARAT

NOMOR : 255/SATPOL PP/ 2025

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN RENCANA KERJA SATUAN POLISI
PAMONG PRAJA PROVINSI KALIMANTAN BARAT TAHUN 2026**

GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan pasal 125 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, diamanatkan untuk membentuk Tim Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a maka Pembentukan Tim Penyusunan Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2026, perlu ditetapkan dengan suatu Keputusan;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6780);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
7. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2024 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 3);
8. Peraturan Gubernur Nomor 120 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 70 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 120 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2019 Nomor 71);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
KESATU : Membentuk Tim Penyusunan Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2026, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Penyusunan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas:
- a. Pengarah :
 1. Membimbing tim pelaksana dalam merealisasikan kegiatan Penyusunan Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2026;
 2. Memberikan koreksi dan masukan dalam pelaksanaan kegiatan Penyusunan Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2026.
 - b. Penanggung Jawab :
 1. Mengarahkan dan membimbing tim pelaksana dalam merealisasikan kegiatan Penyusunan Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2026;
 2. Memberikan koreksi dan masukan dalam pelaksanaan kegiatan Penyusunan Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2026.

c. Ketua :

1. Mengkoordinir seluruh anggota;
2. Memberikan arahan, petunjuk dan bimbingan kepada tim dalam pelaksanaan kegiatan Penyusunan Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2026.
3. Mengendalikan seluruh tahapan dalam pelaksanaan kegiatan Penyusunan Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2026.

d. Sekretaris :

1. Melaksanakan fungsi dukungan administrasi dalam Penyusunan Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2026.
2. Membantu ketua dalam mengendalikan seluruh tahapan dalam pelaksanaan kegiatan Penyusunan Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2026.

e. Anggota :

1. Mengumpulkan dan mengolah data dan informasi dalam rangka Penyusunan Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2026.
2. Melakukan penyesuaian terhadap substansi dalam Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2026 dengan Dokumen Perencanaan Pembangunan lainnya;

KETIGA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pontianak
pada tanggal 12 Februari 2026

Pj. GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,



HARISSON

DAFTAR ISI

	Halaman
DAFTAR ISI	i
BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum.....	2
1.3. Maksud dan Tujuan.....	4
1.4. Sistematika Penulisan.....	5
BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU	
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah.....	6
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.....	7
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah.....	8
2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD.....	8
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.....	8
BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH	
3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional.....	11
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah.....	12
3.3. Program dan Kegiatan.....	13
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	42
BAB V PENUTUP	42

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) merupakan dokumen perencanaan pembangunan tahunan sebagai penjabaran dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang disusun setiap tahunnya dengan memuat rancangan kebijakan, program dan kegiatan, dan permasalahan pada Organisasi Perangkat Daerah.

Rencana Kerja menjabarkan tujuan dan sasaran yang akan dilaksanakan melalui berbagai program dan kegiatan pada setiap tahunnya. Rencana Kerja disusun bersamaan dengan agenda penyusunan dan kebijakan anggaran, yang disertai dengan penetapan rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan, serta menjadi komitmen bagi instansi pemerintah untuk mencapai kinerja dalam tahun yang bersangkutan.

Dokumen Rencana Kerja memuat informasi mengenai sasaran yang ingin dicapai dalam tahun yang bersangkutan, indikator sasaran dan rencana capaiannya, program, kegiatan serta indikator kinerja kegiatan dan rencana capaiannya yang meliputi indikator *input*, *output* dan *outcomes*. Dokumen Rencana Kerja juga memuat informasi mengenai keterkaitan kegiatan dengan sasaran, kebijakan dengan programnya serta keterkaitan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah.

Penetapan indikator-indikator kinerja baik pada tingkat sasaran maupun pada tingkat kegiatan, didasarkan pada perkiraan yang realistis dengan memperhatikan tujuan dan sasaran yang ditetapkan, serta data pendukung yang terorganisir, sehingga keberhasilan pencapaiannya dapat mengindikasikan keberhasilan pencapaian sasaran pada tahun tersebut. Dengan demikian, Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2026 merupakan langkah awal untuk pelaksanaan perencanaan pelaksanaan pembangunan Kepala Daerah yang disesuaikan dengan isu-isu strategis yang berkembang di Provinsi Kalimantan Barat.

1.2. Landasan Hukum

Landasan Hukum yang digunakan dalam penyusunan Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2026 adalah :

- a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- c. Peraturan Pemerintah No 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6205);
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);

- f. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2023 tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja dan Kode Etik Satuan Polisi Pamong Praja;
- g. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
- h. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Perlindungan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 548);
- i. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
- j. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 900.1-2850 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemuktahiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- k. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
- l. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2016 Nomor 8 Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 6);
- m. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 4 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat (Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 4);

- n. Peraturan Gubernur Nomor 70 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2019 Nomor 71);
- o. Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 29 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Ketenteraman, Keteriban Umum, dan Perlindungan Masyarakat (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2022 Nomor 29).
- p. Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 25 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026 (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2025 Nomor 10).

1.3. Maksud dan Tujuan

a. Maksud

Penyusunan Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2026 dimaksudkan merumuskan program dan kegiatan tahunan didasarkan pada rencana yang telah disusun, capaian pelaksanaan dan perubahan lingkungan strategis, terutama dalam pencapaian visi pembangunan jangka menengah Provinsi Kalimantan Barat.

b. Tujuan

Tujuan penyusunan Rencana Kerja Tahun 2026 Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat adalah :

- Mengidentifikasi permasalahan-permasalahan dan capaian pembangunan;
- Mensinergikan rencana pembangunan Satuan Polisi Pamong Praja pada level nasional, provinsi dan kabupaten/kota;
- Merumuskan rencana program/kegiatan tahun 2026 beserta pendanaannya dalam upaya pencapaian target pembangunan yang telah ditetapkan;

- Sebagai acuan penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Provinsi Kalimantan Barat adalah sebagai berikut :

1. Pendahuluan
 - 1.1. Latar Belakang
 - 1.2. Landasan Hukum
 - 1.3. Maksud dan Tujuan
 - 1.4. Sistematika Penulisan
2. Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu
 - 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
 - 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
 - 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
 - 2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD
 - 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat
3. Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah
 - 3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional
 - 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah
 - 3.3. Program dan Kegiatan
4. Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah
5. Penutup

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Tahun 2025, dilaksanakan berdasarkan perhitungan pencapaian kinerja yang diperoleh melalui pengukuran kinerja atas pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat. Pengukuran kinerja ini merupakan hasil dari suatu penilaian sistematis yang sebagian besar didasarkan pada kelompok indikator kinerja yang berupa indikator masukan, keluaran dan hasil. Sedangkan indikator dampak secara umum baru terbatas pada identifikasi untuk melihat keterkaitannya dengan tujuan dan sasaran, mengingat sistem pengumpulan data kinerja saat ini belum sepenuhnya terbangun.

Pengukuran kinerja yang dilakukan mencakup :

- a. Kinerja kegiatan merupakan tingkat pencapaian target dari masing-masing kelompok indikator kegiatan;
- b. Tingkat pencapaian sasaran merupakan tingkat pencapaian target dari masing-masing indikator sasaran yang telah ditetapkan, sebagaimana telah dituangkan dalam Rencana Kinerja Tahunan, dimana tingkat pencapaian sasaran didasarkan pada data hasil pengukuran kinerja kegiatan dan indikator makro yang berhubungan dengan sasaran tersebut.

Berdasarkan uraian di atas, tingkat capaian kinerja sasaran pada Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2025 terdapat 2 (**dua**) **sasaran** dengan menyesuaikan Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat tahun 2025-2029. Dari 2 (dua) sasaran yang dilakukan pengukuran kinerjanya, dapat diklasifikasikan sebagai berikut :

Tabel 2.1

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET
1.	Meningkatnya pelayanan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat	Persentase penyelenggaraan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat	100 %
2.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Nilai SAKIP	81.00

Pelaksanaan capaian sasaran pada tahun 2025 merupakan peralihan penyusunan indikator kinerja utama dan target sebagai tujuan utama OPD dalam pelaksanaan pembangunan selama 5 (lima) tahun. Hal ini juga telah tertuang pada dokumen Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat periode tahun 2025-2029, yang akan dijabarkan pada setiap tahunnya di dokumen Rencana Kerja.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Analisis pencapaian kinerja pelayanan perangkat daerah merupakan capaian yang akan dihasilkan OPD melalui pencapaian sasaran strategis yang telah ditetapkan dengan melihat indikator utama dengan penentuan target yang telah ditetapkan pada setiap tahunnya, berikut tabel penjabaran analisis kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat pada tahun 2025 sebagai berikut :

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET	PENCAPAIAN TARGET
1	Meningkatnya pelayanan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat	Persentase penyelenggaraan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat	100%	100%
2.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Nilai SAKIP	81.00	81.00

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Isu-isu penting terkait penyelenggaraan tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat dilakukan dengan pembahasan, koordinasi dan analisis dengan stakeholder dan aparatur di lingkungan Satpol PP Provinsi Kalbar dengan metode *brainstroming* berdasarkan informasi dan sinkronisasi kebijakan Pemerintah Pusat dan Daerah yang telah tertuang dalam perundangan yang telah ditetapkan. Berikut diuraikan isu strategis Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat yang menjadi bagian penting dalam Rencana Strategis sebagai berikut :

1. Masih rendahnya partisipasi masyarakat dalam taat Perda dan Perkada yang ada saat ini sehingga potensi terjadinya pelanggaran Perda dan Perkada;
2. Masih terbatasnya upaya deteksi dini dan tindakan preventif sangat penting untuk menekan potensi gangguan Trantibum;
3. Minimnya Satlinmas yang aktif berperan dalam rangka pelayanan Ketertiban Umum dan Ketenteramaan Masyarakat (Tibumtranmas);
4. Masih minim dan terbatas peningkatan kapasitas SDM Satpol PP dan PPNS dalam pelayanan Perda/Perkada.

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Dalam review terhadap rancangan awal RKPD semua program dan kegiatan yang akan dilaksanakan Satuan Polisi Pamong Praja pada tahun 2026 sudah tertampung dalam rencana kerja perangkat daerah. Dari 2 (dua) program yang dilaksanakan terdiri dari 1 (satu) program penunjang dan 1 (satu) program prioritas. Untuk kegiatan yang dilaksanakan terdiri dari 8 (delapan) kegiatan penunjang dengan 40 (empat puluh) sub kegiatan dan 3 (tiga) kegiatan prioritas dengan 16 (enam belas) sub kegiatan.

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Adapun penelaahan usulan program dan kegiatan pembangunan Satuan Polisi Pamong Provinsi Kalimantan Barat yang terkait langsung dengan masyarakat antara lain :

a. PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM, dengan kegiatan :

1. Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi, dengan sub kegiatan sebagai berikut :
 - Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Provinsi;
 - Penyediaan Layanan Dasar dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
 - Penindakan atas Gangguan Ketenteraman , Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penerbitan dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa;
 - Pencegahan Gangguan Ketenteraman ,Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan;
 - Pemberdayaan Satuan Tugas Perlindungan Masyarakat dalam penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat;
 - Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja;
 - Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Perlindungan Masyarakat.
2. Penegakan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur, dengan sub kegiatan sebagai berikut :
 - Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur;
 - Penyelidikan terhadap dugaan Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur;
 - Pembinaan dan Penyuluhan terhadap Pelanggar Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur;
 - Pemberkasan Administrasi Penyidikan oleh PPNS Penegak Peraturan Daerah;

- Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
 - Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah.
3. Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Provinsi, dengan sub kegiatan sebagai berikut :
- Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Penegakan Peraturan Daerah;
 - Dukungan Operasional Sekretariat PPNS;
 - Pembentukan PPNS Penegak Peraturan Daerah dalam mendukung pencapaian SPM sub urusan trantibum.

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Peran Strategis Perangkat Daerah Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat dalam menjalankan good governance berdasarkan kebijakan nasional salah satunya berperan sebagai perangkat yang berfungsi sebagai penegak hukum dengan ranah Penegakkan Peraturan Daerah (Perda) yang merupakan salah satu perangkat daerah yang mendukung dan mengawal kebijakan Kepala Daerah Provinsi sebagai wakil perpanjangan tangan Pemerintahan Pusat kepada Daerah sebagai bentuk implementasi Otonomi Daerah. Berdasarkan UU No. 23 Tahun 2014 mengenai pemerintah daerah dan pembagian wilayah sebagai ruang lingkup kerja pemerintah daerah tercantum pada Pasal 2 yaitu: (1) Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah provinsi dan daerah itu dibagi atas kabupaten dan kota. (2) Daerah kabupaten/kota dibagi atas Kecamatan dan Kecamatan dibagi atas kelurahan dan/atau Desa. Hak atas otonomi daerah ini juga tercatum pada UU No. 23 Tahun 2014 Pasal 4 yaitu: (1) Daerah provinsi selain berstatus sebagai juga merupakan Wilayah Administratif yang menjadi wilayah kerja bagi Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan umum di wilayah daerah provinsi. (2) Daerah kabupaten/kota selain berstatus sebagai daerah juga merupakan wilayah Administratif yang menjadi wilayah kerja bagi bupati/ wali kota dalam menyelenggarakan urusan pemerintah umum di wilayah daerah kabupaten/kota.

Perangkat Daerah Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi sebagai perangkat daerah yang memiliki pembagian urusan pemerintahan konkuren wajib sebagai bentuk pelayanan dasar yang memiliki fungsi menjaga ketenteraman dan Ketertiban Umum dan Linmas. Tugas Satuan Polisi Pamong Praja pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja pada pasal 5 (lima) adalah “menegakkan Perda dan Perkada, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman dan menyelenggarakan perlindungan masyarakat”.

Sehingga dalam pelaksanaan tugas Satuan Polisi Pamong Praja berfungsi melaksanakan penegakan Perda, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat, pelaksanaan kebijakan penegakan Perda dan peraturan kepala daerah, pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat di daerah dan pelaksanaan kebijakan perlindungan masyarakat, pelaksanaan koordinasi penegakan Perda dan peraturan kepala daerah, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Penyidik Pegawai Negeri Sipil daerah, dan/atau aparatur lainnya, pengawasan terhadap masyarakat, aparatur, atau badan hukum agar mematuhi dan menaati Perda dan Peraturan Kepala Daerah, dan pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Daerah setempat sesuai kewenangan masing-masing.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

- a. Tujuan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat

Tujuan Perencanaan OPD Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat merupakan pencapaian yang ingin dilakukan dalam melaksanakan kebijakan yang telah ditetapkan sesuai tugas dan fungsi Organisasi Perangkat Daerah. Tujuan yang akan dicapai adalah :

- Meningkatkan Penyelenggaraan Trantibumlinmas, dengan indikator tujuan *“Indeks Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat (trantibumlinmas)”*;

- b. Sasaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat.

Keberhasilan pencapaian sasaran menggambarkan keberhasilan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat beserta jajarannya dalam mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan. Selain itu, keberhasilan pencapaian sasaran tersebut dapat memberikan kontribusi positif pada pencapaian visi-misi yang telah ditetapkan.

Sasaran-sasaran tersebut merupakan sasaran yang ditetapkan dalam rangka mencapai tujuan yang meliputi :

- Meningkatnya pelayanan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat (*trantibumlinmas*), dengan *indikator sasaran presentase penyelenggaraan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat (trantibunlinmas)*;
- Meningkatnya akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah, dengan *indikator sasaran Nilai SAKIP*.

3.3. Program dan Kegiatan

Program merupakan kumpulan kegiatan-kegiatan, sistematis dan terpadu dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Kebijakan dijadikan sebagai acuan untuk mencapai tujuan dan akan menjadi dasar perencanaan dan penganggaran untuk pelaksanaan operasional Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat yang terangkum dalam beberapa program dan kegiatan yang dibedakan pada kegiatan rutin dan prioritas. Adapun program dan kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan antara lain :

1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI

Kegiatan :

- 1) *Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;*

Sub Kegiatan :

- a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah;
- b. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD;
- c. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD;
- d. Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD;
- e. Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD;
- f. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD;
- g. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;
- h. Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah;

- i. Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah;
- j. Penyusunan Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD;
- k. Sinkronisasi dan Harmonisasi Pusat dan Daerah dalam Rangka Mendukung Target Pembangunan Nasional melalui Koordinasi Teknis Pembangunan.

2) *Administrasi Keuangan Perangkat Daerah;*

Sub Kegiatan :

- a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN;
- b. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD;
- c. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD;
- d. Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan;
- e. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD;
- f. Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran.

3) *Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah;*

Sub Kegiatan :

- a. Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD;
- b. Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD;
- c. Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD;
- d. Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD.

4) *Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah;*

Sub Kegiatan :

- a. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya;
- b. Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian;
- c. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan

Fungsi.

5) *Administrasi Umum Perangkat Daerah;*

Sub Kegiatan :

- a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor;
- b. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor;
- c. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga;
- d. Penyediaan Bahan Logistik Kantor;
- e. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan;
- f. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan;
- g. Fasilitas Kunjungan Tamu;
- h. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD;
- i. Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD.

6) *Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;*

Sub Kegiatan :

- a. Pengadaan Mebel;
- b. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya.

7) *Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;*

Sub Kegiatan :

- a. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik;
- b. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.

8) *Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;*

Sub Kegiatan :

- a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan;
- b. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan;
- c. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya.

2. PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

Kegiatan :

1) *Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi;*

Sub Kegiatan:

- a. Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Provinsi;
- b. Penyediaan Layanan Dasar dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
- c. Penindakan atas Gangguan Ketenteraman , Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penerbitan dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa;
- d. Pencegahan Gangguan Ketenteraman ,Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan;
- e. Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum;
- f. Peningkatan Kapasita SDM Satuan Polisi Pamong Praja;
- g. Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Pelindungan Masyarakat.

2) *Penegakan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur,*

Sub Kegiatan :

- a. Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur;
- b. Penyelidikan terhadap dugaan Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur;
- c. Pembinaan dan Penyuluhan terhadap Pelanggar Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur;
- d. Pemberkasan Administrasi Penyidikan oleh PPNS Penegak Peraturan Daerah;
- e. Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur;
- f. Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur.

3) *Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Provinsi;*

Sub Kegiatan :

- a. Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Penegakan Peraturan Daerah;
- b. Dukungan Operasional Sekretariat PPNS;
- c. Pembentukan PPNS Penegak Peraturan Daerah dalam mendukung pencapaian SPM sub urusan trantibum.

Adapun Rencana Program dan Kegiatan beserta indikator kinerja, kelompok sasaran, lokasi kegiatan, kebutuhan dana indikatif dan sumber dana Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat untuk Tahun 2026 tercantum pada tabel dibawah ini sebagai berikut :

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	5.823.100,00	Kota Pontianak, Pontianak Tenggara, Bantir Darat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan	Mewujudka n Kepastian Hukum dan Tata pemerin ntahan yang baik	-		6.500.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI KALIMANTAN BARAT
	1.05.01.1.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD														
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	4.702.500,00	Kota Pontianak, Pontianak Tenggara, Bantir Darat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan	Mewujudka n Kepastian Hukum dan Tata pemerin ntahan yang baik	-		7.800.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI KALIMANTAN BARAT
	1.05.01.1.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD														
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	5.591.500,00	Kota Pontianak, Pontianak Tenggara, Bantir Darat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan	Mewujudka n Kepastian Hukum dan Tata pemerin ntahan yang baik	-		7.700.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI KALIMANTAN BARAT
	1.05.01.1.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / SUB KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS						
											NASIONAL	DAERAH	TARGET		PAGU INDIKATIF (Rp)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI KALIMANTAN BARAT
	1.05.01.1.01.0006		Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	5.616.000,00	Kota Pontianak, Pontianak Tenggara, Bansir Darat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan	Mewujudkan Kepastian Hukum dan Tata pemerintahan yang baik			8.750.000,00		
							4 Laporan	6.233.000,00	Kota Pontianak, Pontianak Tenggara, Bansir Darat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan	Mewujudkan Kepastian Hukum dan Tata pemerintahan yang baik			8.700.000,00		
	1.05.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					4 Laporan	5.620.000,00	Kota Pontianak, Pontianak Tenggara, Bansir Darat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan	Mewujudkan Kepastian Hukum dan Tata pemerintahan yang baik			49.850.000,00		SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI KALIMANTAN BARAT
	1.05.01.1.01.0008																

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS NASIONAL	DAERAH		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
							1 Data	4.785.500,00	Kota Pontianak, Pontianak Tenggara, Bantir Darat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperku a reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta mengp erkuat penc egahan dan pemberant asan jensi korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan	Mewujudka n Kepastian Hukum dan Tata pemeri ntahan yang baik	-		46.500.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI KALIMANTAN BARAT
	1.05.01.1.01.0009	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				1 Berita Acara	26.182.300,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudka n Kepastian Hukum dan Tata pemeri ntahan yang baik	-		13.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI KALIMANTAN BARAT
	1.05.01.1.01.0011	Penyusunan Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD	Jumlah Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD yang disusun				4 dokumen Dokumen	58.904.000,00	Kota Pontianak, Pontianak Tenggara, Bantir Darat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperku a reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta mengp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan	Mewujudka n Kepastian Hukum dan Tata pemeri ntahan yang baik	-		98.500.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI KALIMANTAN BARAT
	1.05.01.1.01.0012	Sinkronisasi dan Harmonisasi Pusat dan Daerah dalam Rangka Mendukung Target Pembangunan Nasional melalui Koordinasi Teknis Pembangunan	Jumlah Berita Acara Hasil Sinkronisasi dan Harmonisasi Pusat dan Daerah dalam Rangka Mendukung Target Pembangunan Nasional melalui Koordinasi Teknis Pembangunan				2 Berita Acara	5.566.000,00	Kota Pontianak, Pontianak Tenggara, Bantir Darat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperku a reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta mengp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan	Mewujudka n Kepastian Hukum dan Tata pemeri ntahan yang baik	-		66.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI KALIMANTAN BARAT

Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2026
Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.05.01.1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-			13 Dokumen	254.924.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pengendalian anggaran dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan	Mewujudkan Kepastian Hukum dan Tata pemerintahan yang baik	-	-	320.600.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI KALIMANTAN BARAT
1.05.01.1.02.0003		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD														
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				4 Dokumen	239.440.000,00	Kota Pontianak, Pontianak Tenggara, Banjar Darat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pengendalian anggaran dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan	Mewujudkan Kepastian Hukum dan Tata pemerintahan yang baik	-		285.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI KALIMANTAN BARAT
1.05.01.1.02.0005		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				2 Laporan	3.812.000,00	Kota Pontianak, Pontianak Tenggara, Banjar Darat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pengendalian anggaran dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan	Mewujudkan Kepastian Hukum dan Tata pemerintahan yang baik	-		7.700.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI KALIMANTAN BARAT
1.05.01.1.02.0006		Pengelolaan dan Penyediaan Bahan Tanggapan Pemeriksaan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
												NASIONAL	DAERAH			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan				1 Dokumen	4.035.000,00	Kota Pontianak, Pontianak Tenggara, Bansir Darat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan	Mewujudkan Kepastian Hukum dan Tata pemerintahan yang baik	-		8.900.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI KALIMANTAN BARAT
	1.05.01.1.02.0007	Kordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Kordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD				12 Laporan	4.217.000,00	Kota Pontianak, Pontianak Tenggara, Bansir Darat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan	Mewujudkan Kepastian Hukum dan Tata pemerintahan yang baik	-		12.500.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI KALIMANTAN BARAT
	1.05.01.1.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Laporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				1 Dokumen	3.420.000,00	Kota Pontianak, Pontianak Tenggara, Bansir Darat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan	Mewujudkan Kepastian Hukum dan Tata pemerintahan yang baik	-		6.500.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI KALIMANTAN BARAT

Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2026
Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS NASIONAL		DAERAH	TARGET		PAGU INDIKATIF (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.05.01.1.03	1.05.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-	-	5 Dokumen	15.999.900,00	-	-	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penguatan peran pemerintah daerah	Mewujudkan Kepastian Hukum dan Tata pemerintahan yang baik	-	-	23.600.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI KALIMANTAN BARAT
1.05.01.1.03.0001	1.05.01.1.03.0001	Penyusunan Pemencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	-	-	1 Dokumen	4.000.000,00	Kota Pontianak, Pontianak Tenggara, Banjar Darat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penguatan peran pemerintah daerah	Mewujudkan Kepastian Hukum dan Tata pemerintahan yang baik	-	-	4.500.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI KALIMANTAN BARAT
1.05.01.1.03.0003	1.05.01.1.03.0003	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	2 Laporan	-	-	2 Laporan	3.999.900,00	Kota Pontianak, Pontianak Tenggara, Banjar Darat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penguatan peran pemerintah daerah	Mewujudkan Kepastian Hukum dan Tata pemerintahan yang baik	-	-	6.800.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI KALIMANTAN BARAT
1.05.01.1.03.0005	1.05.01.1.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD														

Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2026
Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	4.000.000,00	Kota Pontianak, Pontianak Tenggara, Banjar Darat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	Mewujudkan Kepastian Hukum dan Tata pemerintahan yang baik			6.500.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI KALIMANTAN BARAT
	1.05.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	4.000.000,00	Kota Pontianak, Pontianak Tenggara, Banjar Darat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	Mewujudkan Kepastian Hukum dan Tata pemerintahan yang baik			5.800.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI KALIMANTAN BARAT
	1.05.01.1.05	Administrasi Kopogawalan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penentuan Administrasi Kopogawalan				6 Laporan	365.489.500,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	Mewujudkan Kepastian Hukum dan Tata pemerintahan yang baik	ASN		407.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI KALIMANTAN BARAT
	1.05.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya														

Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2026
Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS					
											NASIONAL	DAERAH		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Pakatan Dinas Beserta Atribut Kelengkapan				4 Paket	227.400.000,00	Kota Pontianak, Pontianak Tenggara, Bantir Darat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat informasi politik, hukum dan keadilan, serta mempertahankan kepercayaan yang baik	Mewujudkan Kepastian Hukum dan Tata pemerintahan yang baik	ASN		300.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI KALIMANTAN BARAT
	1.05.01.1.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kopogawalan	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kopogawalan				2 Dokumen	33.089.500,00	Kota Pontianak, Pontianak Tenggara, Bantir Darat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat informasi politik, hukum dan keadilan, serta mempertahankan kepercayaan yang baik	Mewujudkan Kepastian Hukum dan Tata pemerintahan yang baik	ASN		55.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI KALIMANTAN BARAT
	1.05.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				30 Orang	105.000.000,00	Semua Kota/Kab. Semua Kecamatan, Semua Kari/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat informasi politik, hukum dan keadilan, serta mempertahankan kepercayaan yang baik	Mewujudkan Kepastian Hukum dan Tata pemerintahan yang baik	ASN		45.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI KALIMANTAN BARAT
	1.05.01.1.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan														

Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2026
Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RESTRUKTURISASI OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	NASIONAL	DAERAH		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				50 Orang	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegakan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan	Mewujudkan Kepastian Hukum dan Tata pemerintahan yang baik	ASN		7.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI KALIMANTAN BARAT
	1.05.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	-			11 Laporan	623.789.399,99			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegakan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan	Mewujudkan Kepastian Hukum dan Tata pemerintahan yang baik	ASN	-	1.038.500.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI KALIMANTAN BARAT
	1.05.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	7.609.000,00	Kota Pontianak, Pontianak Tenggara, Bantir Darat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegakan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan	Mewujudkan Kepastian Hukum dan Tata pemerintahan yang baik	ASN		8.500.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI KALIMANTAN BARAT
	1.05.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														

Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2026
Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS					
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Peralatan dan Pentongkapian Kantor yang Disediakan				1 Paket	35.587.700,00	Kota Pontianak, Pontianak Tenggara, Banisr Darat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegagan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	Mewujudkan Kepastian Hukum dan Tata pemerintahan yang baik	ASN		47.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI KALIMANTAN BARAT
	1.05.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	39.544.000,00	Kota Pontianak, Pontianak Tenggara, Banisr Darat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegagan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	Mewujudkan Kepastian Hukum dan Tata pemerintahan yang baik	ASN		57.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI KALIMANTAN BARAT
	1.05.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	204.876.000,00	Kota Pontianak, Pontianak Tenggara, Banisr Darat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegagan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	Mewujudkan Kepastian Hukum dan Tata pemerintahan yang baik	ASN		525.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI KALIMANTAN BARAT
	1.05.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														

Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2026
Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE REINSTR OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	2	3	4	5	6	7	1 Paket	28.798.000,00	Kota Pontianak, Pontianak Tenggara, Bansir Darat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan brokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	Mewujudkan Kepastian Hukum dan Tata pemerintahan yang baik	ASN		32.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI KALIMANTAN BARAT
1.05.01.1.06.0006																
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disodakan				1 Dokumen	5.400.000,00	Kota Pontianak, Pontianak Tenggara, Bansir Darat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan brokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	Memperkuat Fondasi Pemerintahan Kalimantan Barat yang inkuisit dan Berkelanjutan	ASN		13.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI KALIMANTAN BARAT
1.05.01.1.06.0008																
		Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas/ Kunjungan Tamu				1 Laporan	6.000.000,00	Kota Pontianak, Pontianak Tenggara, Bansir Darat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan brokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	Mewujudkan Kepastian Hukum dan Tata pemerintahan yang baik	ASN		7.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI KALIMANTAN BARAT
1.05.01.1.06.0009																
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET (Rp)		
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyelingkaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	266.821.699,99	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Bansir Darat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta meng erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan	Mewujudkan Kepastian Hukum dan Tata pemer intahan yang baik	ASN		280.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI KALIMANTAN BARAT
	1.05.01.1.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				1 Dokumen	29.155.000,00	Kota Pontianak, Pontianak Tenggara, Bansir Darat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta meng erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan	Mewujudkan Kepastian Hukum dan Tata pemer intahan yang baik	ASN		37.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI KALIMANTAN BARAT
	1.05.01.1.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				1 Dokumen	0,00	Kota Pontianak, Pontianak Tenggara, Bansir Darat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta meng erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan	Mewujudkan Kepastian Hukum dan Tata pemer intahan yang baik	ASN		32.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI KALIMANTAN BARAT

Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2026
Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE REINSTR OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL	DAERAH					
1	2	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Penambahan Barang Milik Daerah	-			16 unit	56.862.000,00	10	11	12	13	-	15	16	17	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI KALIMANTAN BARAT
	1.05.01.1.07										Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penguatan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	Mewujudkan Kepastian Hukum dan Tata pemerintahan yang baik			137.500.000,00		
	1.05.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				2 Paket	19.290.000,00	Kota Pontianak, Pontianak Tenggara, Banjar Darat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penguatan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	Mewujudkan Kepastian Hukum dan Tata pemerintahan yang baik	-		39.000.000,00		SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI KALIMANTAN BARAT
	1.05.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				9 Unit	37.572.000,00	Kota Pontianak, Pontianak Tenggara, Banjar Darat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penguatan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	Mewujudkan Kepastian Hukum dan Tata pemerintahan yang baik	-		98.500.000,00		SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI KALIMANTAN BARAT

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	-	14	15	16	17
1.05.01.1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urutan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urutan Pemerintahan Daerah	-			4 Laporan	279.128.000,00			Memperkuat t reformasi politik, dan hukum dan birokrasi, serta mengp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan	Mewujudka n Kepastian Hukum dan Tata peme ntahan yang baik	-			905.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI KALIMANTAN BARAT
1.05.01.1.08.0002		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	119.904.000,00	Kota Pontianak, Pontianak Tenggara, Bansir Darat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta mengp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan	Mewujudka n Kepastian Hukum dan Tata peme ntahan yang baik	-			135.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI KALIMANTAN BARAT
1.05.01.1.08.0004		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	159.224.000,00	Kota Pontianak, Pontianak Tenggara, Bansir Darat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta mengp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan	Mewujudka n Kepastian Hukum dan Tata peme ntahan yang baik	-			770.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI KALIMANTAN BARAT

Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2026
Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENJARA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS NASIONAL	DAERAH	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	15	16	17
1.05.01.1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah yang dilakukan pemeliharaan/rehabilitasi	-	-	-	70 Unit	217.214.100,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegakan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan perjudian ilegal	Mewujudkan Kepastian Hukum dan Tata pemerintahan yang baik	-	296.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI KALIMANTAN BARAT
1.05.01.1.09.0001		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	-	-	-	1 Unit	45.125.000,00	Kota Pontianak, Pontianak Tenggara, Bantir Darat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegakan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan perjudian ilegal	Mewujudkan Kepastian Hukum dan Tata pemerintahan yang baik	-	44.500.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI KALIMANTAN BARAT
1.05.01.1.09.0002		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Periznannya	-	-	-	24 Unit	156.849.100,00	Kota Pontianak, Pontianak Tenggara, Bantir Darat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegakan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan perjudian ilegal	Mewujudkan Kepastian Hukum dan Tata pemerintahan yang baik	-	160.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI KALIMANTAN BARAT
1.05.01.1.09.0006		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS					
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				26 Unit	15.240.000,00	Kota Pontianak, Pontianak Tenggara, Banair Darat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuas t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkual penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan	Mewjudka n Kepasitan Hukum dan Tata pemerin ntahan yang baik	-		38.500.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PRINSI KALIMANTAN BARAT
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																
	1.05.01.1.09.0009		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	0,00	Kota Pontianak, Pontianak Tenggara, Banair Darat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuas t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkual penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan	Mewjudka n Kepasitan Hukum dan Tata pemerin ntahan yang baik	-		21.500.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI KALIMANTAN BARAT
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																
	1.05.01.1.09.0010		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	0,00	Kota Pontianak, Pontianak Tenggara, Banair Darat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuas t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkual penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan	Mewjudka n Kepasitan Hukum dan Tata pemerin ntahan yang baik	-		31.500.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI KALIMANTAN BARAT
2.	1.05.02	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	-	-			-	2.860.857.160,01						-	5.194.260.000,00	

Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2026
Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat

NO	KODE	URUSAN / BIDANG KEGIATAN / PROGRAM / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB		
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS						
											NASIONAL		DAERAH				
1	2	1.05.02.1.01	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Peningkatan Gangguan Kelentraman dan Keterlambatan Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	-			100 persen	1.583.783.100,00				Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegakan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan	Mewujudkan Kepastian Hukum dan Tata pemerintahan yang baik	Masyarakat, OPD, ASN, Salimnas	-	2.869.900.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI KALIMANTAN BARAT
	1.05.02.1.01.0012	Pembentukan Satgas Linmas	Jumlah Dokumen SK Pembentukan Satgas Linmas tingkat Provinsi dalam Penyelenggaraan Linmas melalui SK Gubernur				1 Dokumen	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegakan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan	Mewujudkan Kepastian Hukum dan Tata pemerintahan yang baik	Masyarakat, OPD, ASN, Salimnas			21.500.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI KALIMANTAN BARAT
	1.05.02.1.01.0014	Koordinasi Penyelenggaraan	Keterlambatan, Keterlambatan Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Provinsi				4 Dokumen	283.373.200,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegakan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan	Mewujudkan Kepastian Hukum dan Tata pemerintahan yang baik	Masyarakat, OPD, ASN, Salimnas			608.900.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI KALIMANTAN BARAT
	1.05.02.1.01.0015	Penyediaan Layanan Dasar dalam rangka Dampak Pengakuan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah															

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS					
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Pemberian Pelayanan Dasar Kepada Warga Yang Mendapat Penegakan Perda dan Perkada				1 Laporan	9.747.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta mengartkuat panc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan	Masyarakat, OPD, ASN, Salimmas			25.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI KALIMANTAN BARAT
	1.05.02.1.01.0020	Penindakan atas Gangguan Ketertarikan dan Keterlambatan Umum Berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penerbitan dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan	Jumlah Laporan Gangguan Ketertarikan dan Keterlambatan Umum Berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penerbitan dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan	4 Laporan				78.021.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta mengartkuat panc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan	Masyarakat, OPD, ASN, Salimmas			210.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI KALIMANTAN BARAT
	1.05.02.1.01.0021	Pencegahan Gangguan Ketertarikan dan Keterlambatan Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan dan Pengawasan	Jumlah Laporan Gangguan Ketertarikan dan Keterlambatan Umum yang Dideteksi Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan dan Pengawasan	4 laporan				800.135.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta mengartkuat panc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan	Masyarakat, OPD, ASN, Salimmas			1.100.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI KALIMANTAN BARAT
	1.05.02.1.01.0022	Pembudayaan Satuan Tugas Perlindungan Masyarakat dalam penyelenggaraan Ketertarikan, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah laporan yang Menerima Hasil Pemberdayaan Satuan Tugas Pelindungan Masyarakat dalam rangka Keterlindungan dan Ketertiban Umum serta Pelindungan Masyarakat				4 Laporan	103.484.900,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta mengp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan	Mewujudka n Kepastian Hukum dan Tata pem rtahan yang baik	Masyarakat, OPD, ASN, Satlinmas		358.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI KALIMANTAN BARAT
	1.05.02.1.01.0024	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja	Jumlah Aparatur Satpol PP yang mengikuti peningkatan kapasitas				50 Orang	21.594.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta mengp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan	Mewujudka n Kepastian Hukum dan Tata pem rtahan yang baik	Masyarakat, OPD, ASN, Satlinmas		70.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI KALIMANTAN BARAT
	1.05.02.1.01.0030	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Pelindungan Masyarakat	Jumlah SDM Satuan Perindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya				120 Orang	287.448.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta mengp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan	Mewujudka n Kepastian Hukum dan Tata pem rtahan yang baik	Masyarakat, OPD, ASN, Satlinmas		478.500.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI KALIMANTAN BARAT

Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2026
Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN		PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.05.02.1.02		Pengawasan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur	Penyusunan Perda dan Perkada yang ditandatangani	-			100 persen	1.157.140.460,01			Memperkuat reformasi birokrasi, serta meningkatkan pelayanan publik, asan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan	Mewujudkan Kepastian Hukum dan Tata pemerintahan yang baik	Masyarakat, OPD, ASN, Satlinmas	-	1.754.360.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI KALIMANTAN BARAT
1.05.02.1.02.0002		Pengawasan atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan pengawasan yang dilakukan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur				4 Laporan	564.242.760,01	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DBH CUKAI HASIL TENBAKAU (CHT)	Memperkuat reformasi birokrasi, serta meningkatkan pelayanan publik, asan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan	Mewujudkan Kepastian Hukum dan Tata pemerintahan yang baik	Masyarakat, OPD, ASN, Satlinmas		620.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI KALIMANTAN BARAT
1.05.02.1.02.0005		Penyelidikan terhadap dugaan Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	Jumlah Laporan Hasil Penyelidikan atas Dugaan Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur				1 laporan	50.139.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi birokrasi, serta meningkatkan pelayanan publik, asan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan	Mewujudkan Kepastian Hukum dan Tata pemerintahan yang baik	Masyarakat, OPD, ASN, Satlinmas		95.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI KALIMANTAN BARAT
1.05.02.1.02.0008		Pembinaan dan Penyuluhan terhadap Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur														

Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2026
Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS NASIONAL DAERAH		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Penyuluhan atas Pelanggar Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur				4 laporan	75.710.000,00	Semua Kab/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta meningkatkan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan pelanggaran	Mewujudkan Kepastian Hukum dan Tata pemerintahan yang baik	Masyarakat, OPD, ASN, Satlinmas		196.800.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI KALIMANTAN BARAT
	1.05.02.1.02.0009	Pemberkasan Administrasi Penyidikan oleh PPNS Penegak Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Pemberkasan Hasil Penyidikan atas Pelanggaran Pinda				1 Dokumen	35.343.100,00	Semua Kab/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta meningkatkan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan pelanggaran	Mewujudkan Kepastian Hukum dan Tata pemerintahan yang baik	Masyarakat, OPD, ASN, Satlinmas		150.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI KALIMANTAN BARAT
	1.05.02.1.02.0010	Sosialisasi Ketentuan Sanksi Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penerapan Peraturan Daerah dan Peraturan Peraturan Kepala Daerah				4 Laporan	271.508.000,00	Semua Kab/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta meningkatkan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan pelanggaran	Mewujudkan Kepastian Hukum dan Tata pemerintahan yang baik	Masyarakat, OPD, ASN, Satlinmas		302.560.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI KALIMANTAN BARAT
	1.05.02.1.02.0012	Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah														

Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2026
Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
												NASIONAL	DAERAH			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Hasil Pemeriksaan dan Pemberian Rekomendasi dari Penyelidikan Daerah dan Peraturan Peraturan Kepala Daerah Sesuai SOP				4 Laporan	160.197.600,00	Semua Kab/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperku a reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan	Mewujudka n Kepastian Hukum dan Tata pemer ntahan yang baik	Masyarakat, OPD, ASN, Satlinmas			SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI KALIMANTAN BARAT
	1.05.02.1.03	Pembinaan Peningdik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Provinsi	Persentase PPNS yang kompeten				100 persen	119.933.600,00			Memperku a reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan	Mewujudka n Kepastian Hukum dan Tata pemer ntahan yang baik	PPNS	-	560.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI KALIMANTAN BARAT
	1.05.02.1.03.0004	Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Penegakan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Penegakan Peraturan Daerah				1 Dokumen	52.482.600,00	Semua Kab/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperku a reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan	Mewujudka n Kepastian Hukum dan Tata pemer ntahan yang baik	PPNS		90.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI KALIMANTAN BARAT
	1.05.02.1.03.0005	Dukungan Operasional Sekretariat PPNS														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
			Jumlah Laporan Hasil Kinerja Sekretariat PPNS				1 laporan	37.451.000,00	Semua Kab/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Mempertu i reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant aan	Mewujudk n Kepastian Hukum dan Tata pemer intahan yang baik	PPNS		350.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI KALIMANTAN BARAT	
	1.05.02.1.03.0008	Pembentukan PPNS Ponegak Peraturan Daerah dalam mendukung pencapaian SPM sub urusan trantibum	Jumlah Aparatur yang Mengikuti Dilat PPNS Ponegak Peraturan Daerah				1 Laporan	30.000.000,00	Semua Kab/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Mempertu i reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant aan	Mewujudk n Kepastian Hukum dan Tata pemer intahan yang baik	PPNS		120.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI KALIMANTAN BARAT	
			J U M L A H					4.809.263.960,00							8.648.760.000,00		

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V

PENUTUP

Dokumen Rencana Kerja (RENJA) Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2026 merupakan pelaksanaan perencanaan pembangunan yang telah disesuaikan dengan isu-isu strategis berdasarkan tujuan dan sasaran pada dokumen Rencana Kerja Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat yang disusun dengan memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2024-2026. Maka perencanaan kerja perangkat daerah merupakan dokumen awal sebagai acuan Perangkat Daerah untuk menjalankan program dan kegiatan Pembangunan Daerah sehingga dokumen ini diharapkan mempertegas posisi dan peranan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat melalui perencanaan kerja Perangkat Daerah pada pelaksanaan program dan kegiatan yang dapat memberikan kontribusi yang bermanfaat bagi masyarakat di Kalimantan Barat.

Dengan demikian Rencana Kerja merupakan kerangka landasan bagi penyusunan arah, kebijakan dan strategis implementasi APBD serta memberikan arah kejelasan kinerja bagi Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat dalam melaksanakan kebijakan, program dan kegiatan.

Pontianak, Agustus 2025

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
Provinsi Kalimantan Barat,



Suherman, S.H., M.H.
Pembina Utama Muda / IVc
NIP. 19701110 200212 1 005